

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan nasional maupun global. Selama beberapa dekade terakhir, sektor ini berkembang menjadi salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia karena mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, investasi, pengembangan wilayah, serta pertumbuhan berbagai sektor ekonomi lainnya. Aktivitas pariwisata tidak lagi dipandang hanya sebagai kegiatan rekreasi, melainkan telah menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghubungkan dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara simultan. Oleh karena itu, banyak negara menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi sekaligus memperkuat posisi mereka dalam perekonomian global.

Perkembangan industri pariwisata dunia menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian internasional. Menurut *World Travel & Tourism Council (WTTC)*, sektor perjalanan dan pariwisata menyumbang sekitar 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global serta mendukung lebih dari 357 juta lapangan pekerjaan atau sekitar satu dari setiap sepuluh pekerjaan di dunia pada tahun 2024. Selain itu, nilai ekonomi sektor ini diperkirakan telah melampaui US\$11 triliun, menunjukkan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor dengan kemampuan pemulihan tercepat setelah

pandemi COVID-19 (WTTC, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya memiliki arti penting bagi negara-negara yang bergantung pada sektor jasa, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi global.

Di sisi lain, pertumbuhan industri pariwisata yang semakin pesat juga memunculkan berbagai tantangan baru. Peningkatan jumlah wisatawan, pembangunan infrastruktur wisata, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, mengancam keberlanjutan budaya lokal, serta meningkatkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata yang tidak dikelola secara berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi ekosistem, peningkatan emisi karbon, kerusakan kawasan konservasi, hingga komersialisasi budaya masyarakat lokal (Hall, Scott, & Gössling, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tidak lagi dapat diukur semata-mata melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan atau pendapatan devisa, tetapi juga melalui kemampuan suatu negara dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

Merespons berbagai tantangan tersebut, komunitas internasional mulai mengembangkan paradigma sustainable tourism sebagai arah baru pembangunan sektor pariwisata global. Konsep ini memperoleh perhatian yang semakin besar sejak diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada Tujuan 8, Tujuan 12, dan Tujuan 14 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pola konsumsi

dan produksi yang bertanggung jawab, serta perlindungan ekosistem laut. Dalam perspektif *United Nations Tourism (UN Tourism)*, *sustainable tourism* merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang mempertimbangkan secara seimbang dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan guna memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (UN Tourism, 2024). Dengan demikian, pembangunan pariwisata tidak lagi berorientasi pada pertumbuhan kuantitatif semata, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan manfaat ekonomi yang inklusif, menjaga kelestarian lingkungan, melindungi warisan budaya, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi pariwisata terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki kekayaan bentang alam, keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya yang menjadi modal utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Berbagai destinasi wisata berbasis alam, budaya, bahari, maupun ekowisata tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Bali, Raja Ampat, Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, Yogyakarta, hingga kawasan konservasi di berbagai taman nasional. Kekayaan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan daya tarik wisata yang sangat tinggi di kawasan Asia Pasifik sekaligus memberikan peluang besar untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia juga menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan karena memiliki *multiplier effect* yang luas terhadap berbagai sektor lain, seperti

transportasi, perhotelan, ekonomi kreatif, perdagangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, pemanfaatan sumber daya pariwisata Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan daya saing sektor ini belum optimal. Pertumbuhan jumlah wisatawan yang tinggi pada sejumlah destinasi populer belum selalu diikuti dengan tata kelola destinasi yang berkelanjutan. Beberapa kawasan wisata mengalami tekanan akibat pencemaran lingkungan, peningkatan volume sampah, alih fungsi lahan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta penurunan kualitas lingkungan sebagai dampak aktivitas pariwisata yang tidak terkendali. Di sisi lain, fenomena *overtourism* mulai muncul pada sejumlah destinasi unggulan, terutama di kawasan yang menerima konsentrasi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, seperti Bali dan beberapa destinasi prioritas nasional. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan berupa kemacetan, tekanan terhadap infrastruktur publik, meningkatnya konsumsi sumber daya alam, serta berkurangnya kenyamanan masyarakat lokal dan wisatawan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup diukur dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai organisasi internasional juga menekankan bahwa pengelolaan destinasi perlu beralih dari orientasi pertumbuhan menuju pengelolaan yang lebih berkelanjutan sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan lingkungan dan sosial dalam industri pariwisata global.

Berbagai tantangan tersebut mendorong Indonesia untuk menjadikan *sustainable tourism* sebagai salah satu arah utama pembangunan sektor pariwisata. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pelestarian lingkungan, tetapi juga penguatan tata kelola destinasi, pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan kualitas pelayanan, serta pembangunan sumber daya manusia yang mampu menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik industri pariwisata. Dengan demikian, transformasi menuju *sustainable tourism* bukan sekadar perubahan paradigma dalam pengelolaan destinasi wisata, melainkan juga perubahan dalam sistem pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja yang akan menjadi penggerak utama pembangunan pariwisata Indonesia pada masa mendatang.

Sumber daya manusia merupakan aktor utama yang menerjemahkan berbagai kebijakan pembangunan ke dalam praktik pengelolaan destinasi, pelayanan wisata, konservasi lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat lokal. Tanpa didukung tenaga kerja yang memiliki kompetensi profesional dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keberlanjutan, berbagai kebijakan *sustainable tourism* berpotensi hanya menjadi konsep normatif yang sulit diimplementasikan secara efektif.

Dalam perspektif pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dipandang sebagai bentuk pembangunan kapasitas (*capacity building*) yang berperan penting dalam memperkuat kemampuan individu maupun institusi dalam mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan. *United Nations Development Programme (UNDP)* mendefinisikan *capacity building* sebagai proses pengembangan kemampuan individu, organisasi, dan sistem kelembagaan agar

mampu melaksanakan fungsi, memecahkan permasalahan, serta mencapai tujuan pembangunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (UNDP, 2009). Dalam konteks pariwisata, pembangunan kapasitas tidak hanya mencakup peningkatan keterampilan teknis tenaga kerja, tetapi juga pengembangan kemampuan manajerial, kepemimpinan, inovasi, adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta kemampuan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan demikian, pembangunan kapasitas menjadi fondasi utama dalam menciptakan sektor pariwisata yang mampu bersaing sekaligus mempertahankan keberlanjutan sumber daya yang dimiliki.

Salah satu instrumen paling strategis dalam membangun kapasitas tersebut adalah pendidikan kepariwisataan. Pendidikan tidak hanya berfungsi menghasilkan tenaga kerja yang siap memasuki dunia industri, tetapi juga membentuk pola pikir, nilai, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjawab tantangan pembangunan pariwisata modern. Melalui sistem pendidikan yang berkualitas, peserta didik tidak hanya memperoleh keterampilan operasional di bidang pelayanan (*hospitality*), tetapi juga dibekali kemampuan dalam pengelolaan destinasi, konservasi lingkungan, kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, komunikasi lintas budaya, hingga pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, pendidikan kepariwisataan saat ini dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang akan menentukan daya saing industri pariwisata suatu negara.

Meskipun demikian, pengembangan pendidikan kepariwisataan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan

industri pariwisata yang berkembang semakin dinamis. Kurikulum pada sebagian institusi pendidikan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital, konsep *experience economy*, standar pelayanan internasional, maupun prinsip-prinsip *sustainable tourism*. Selain itu, hubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri masih memerlukan penguatan sehingga proses pembelajaran belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kesiapan lulusan untuk menghadapi tuntutan industri pariwisata global yang semakin kompetitif.

Menghadapi tantangan tersebut, berbagai negara mulai memanfaatkan kerja sama internasional sebagai salah satu strategi pembangunan kapasitas (*capacity building*) di bidang pendidikan. Dalam kajian Hubungan Internasional, kerja sama pembangunan (*development cooperation*) tidak lagi dipahami semata sebagai pemberian bantuan (*foreign aid*), tetapi berkembang menjadi mekanisme pertukaran pengetahuan (*knowledge transfer*), alih teknologi (*technology transfer*), penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Melalui mekanisme tersebut, negara berkembang memperoleh kesempatan untuk mengadaptasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari negara lain yang telah memiliki pengalaman dan keunggulan pada bidang tertentu, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung lebih efektif dibandingkan apabila hanya mengandalkan kapasitas domestik.

Dalam sektor pariwisata, pendekatan tersebut menjadi semakin relevan karena perkembangan industri berlangsung sangat cepat dan dipengaruhi oleh standar internasional yang terus berkembang. Harmonisasi kurikulum, sertifikasi

kompetensi, sistem pembelajaran berbasis industri, serta penguatan hubungan antara institusi pendidikan dan dunia usaha merupakan beberapa aspek yang sulit dikembangkan secara optimal tanpa adanya kolaborasi dengan negara yang telah memiliki sistem pendidikan pariwisata yang matang. Oleh karena itu, kerja sama internasional di bidang pendidikan kepariwisataan tidak hanya menjadi sarana pertukaran akademik, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi pembangunan yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, transfer pengalaman, serta penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan vokasi secara berkelanjutan. Berikut merupakan tabel kerjasama antara Indonesia dengan beberapa negara mitra kerjasama pendidikan

Tabel 1.1. Perbandingan Kerja Sama Pendidikan Indonesia dengan Negara Mitra

No.	Kerja Sama Pendidikan Indonesia dengan Negara Mitra	Fokus dan Dampak Kerja Sama
1	Indonesia–Jerman, kerja sama pendidikan dan pelatihan teknik dan vokasi (TVET)	Kerja sama berfokus pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengembangan pendidikan berbasis kompetensi, keterlibatan industri, serta penguatan model pendidikan vokasi sistem ganda.
2	Indonesia–Jepang, kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi melalui JICA	Kerja sama berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, pengembangan tenaga pendidik, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan.
3	Indonesia–Australia, kerja sama Vocational Education and Training (VET)	Kerja sama diarahkan pada pengembangan keterampilan, peningkatan kapasitas penyedia pendidikan vokasi, penguatan hubungan pendidikan dengan industri, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan berstandar internasional.
4	Indonesia–Swiss, SUSTOUR, STED, S4C dan SS4C	Kerja sama memiliki cakupan yang menghubungkan pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan reformasi pendidikan vokasi. Dampaknya mencakup peningkatan kompetensi mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum berbasis industri, industry attachment, project-based learning, penguatan hubungan institusi pendidikan dengan industri, serta penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan vokasi.

Kerja sama internasional dalam bidang pendidikan vokasi telah dilakukan Indonesia dengan berbagai negara, antara lain Jerman, Jepang, Australia, dan Swiss. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerja sama pendidikan Indonesia dengan negara mitra memiliki fokus yang relatif serupa dalam penguatan pendidikan vokasi, terutama melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri. Kerja sama Indonesia–Jerman menekankan pengembangan sistem pendidikan vokasi berbasis kompetensi dan sistem ganda, sedangkan Indonesia–Jepang lebih berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dan transfer teknologi. Sementara itu, kerja sama Indonesia–Australia diarahkan pada penguatan kapasitas penyelenggara pendidikan vokasi dan peningkatan keterhubungan dengan industri. Dibandingkan dengan ketiga kerja sama tersebut, kerja sama Indonesia–Swiss melalui SUSTOUR, STED, S4C, dan SS4C memiliki karakteristik yang lebih spesifik karena menghubungkan pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan penguatan pendidikan vokasi. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup peningkatan kompetensi mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik, tetapi juga pengembangan kurikulum berbasis industri, industry attachment, project-based learning, serta penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan. Dengan demikian, kerja sama Indonesia–Swiss menunjukkan keterkaitan yang lebih langsung antara kebutuhan pengembangan sustainable tourism dan transformasi pendidikan kepariwisataan.

Di antara berbagai kerja sama tersebut, kerja sama Indonesia–Swiss memiliki karakteristik yang lebih relevan dengan penelitian mengenai pendidikan pariwisata berbasis sustainable tourism. Hal tersebut terlihat dari perkembangan

kerja sama yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi secara khusus menghubungkan pengembangan sektor pariwisata dengan penguatan pendidikan vokasi. Kerja sama tersebut berkembang melalui program WISATA dan SUSTOUR yang berorientasi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, kemudian dilanjutkan melalui Sustainable Tourism Education Development (STED) dan Swiss Skills for Competitiveness (SS4C) yang memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan pendidikan vokasi dan keterkaitannya dengan kebutuhan industri. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dari sekadar menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan operasional menuju pembentukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk merespons perubahan kebutuhan industri sekaligus memahami prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata.

Di antara berbagai negara yang memiliki keunggulan dalam pendidikan kepariwisataan, Swiss menempati posisi yang sangat strategis. Selama lebih dari satu abad, Swiss dikenal sebagai salah satu pelopor pendidikan hospitality modern melalui sistem pendidikan vokasi yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan praktik industri secara intensif. Berbagai institusi pendidikan seperti EHL Hospitality Business School, Les Roches Global Hospitality Education, Glion Institute of Higher Education, dan Swiss Hotel Management School secara konsisten dikenal sebagai institusi terkemuka dalam bidang hospitality management. Keunggulan tersebut tidak hanya tercermin pada kualitas institusi pendidikannya, tetapi juga pada penerapan sistem Dual Vocational Education and Training (dVET) yang menempatkan industri sebagai bagian integral dari proses

pembelajaran. Model ini menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan antara kompetensi akademik, keterampilan praktis, dan pengalaman kerja sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.

Dalam konteks sustainable tourism, keunggulan sistem pendidikan Swiss menjadi semakin relevan karena tuntutan terhadap tenaga kerja pariwisata telah mengalami perubahan. Industri pariwisata tidak lagi hanya membutuhkan tenaga kerja yang mampu memberikan pelayanan secara efektif, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari aktivitas pariwisata. Oleh karena itu, pendidikan kepariwisataan perlu mengembangkan kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada technical skills, tetapi juga membangun sustainability competencies. Kurikulum pendidikan kepariwisataan berkelanjutan pada dasarnya perlu mengintegrasikan pemahaman mengenai pengelolaan sumber daya secara efisien, konservasi lingkungan, pengurangan limbah dan emisi, perlindungan nilai sosial dan budaya masyarakat lokal, keterlibatan komunitas, responsible tourism, etika bisnis, serta penciptaan manfaat ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat destinasi.

Dalam kerangka tersebut, kerja sama Indonesia–Swiss memiliki relevansi strategis karena pengembangan kurikulum tidak hanya diarahkan untuk menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, tetapi juga untuk memasukkan prinsip keberlanjutan ke dalam proses pembentukan kompetensi tersebut. Integrasi sustainable tourism ke dalam kurikulum dapat dilakukan melalui pengembangan mata kuliah atau modul yang secara khusus membahas sustainable tourism, maupun melalui mainstreaming sustainability pada berbagai mata kuliah yang telah ada. Misalnya, prinsip keberlanjutan dapat diintegrasikan ke dalam

hospitality management melalui pengelolaan energi dan air, waste management, sustainable procurement, dan green hotel operations; ke dalam destination management melalui carrying capacity, community participation, conservation, dan pengelolaan overtourism; serta ke dalam tourism business melalui sustainable entrepreneurship, responsible marketing, dan pengukuran dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan demikian, kurikulum pendidikan kepariwisataan berkelanjutan tidak seharusnya dipahami hanya sebagai penambahan materi mengenai lingkungan ke dalam kurikulum yang sudah ada. Lebih jauh, sustainability perlu ditempatkan sebagai prinsip yang melandasi proses pendidikan, mulai dari learning outcomes, struktur kurikulum, metode pembelajaran, praktik industri, assessment, hingga hubungan antara institusi pendidikan dengan stakeholders pariwisata. Pendekatan tersebut memungkinkan mahasiswa tidak hanya mengetahui konsep sustainable tourism secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi kerja yang nyata. Mahasiswa, misalnya, dapat dilatih untuk mengidentifikasi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dalam operasional hotel, merancang strategi pengurangan food waste, menyusun pendekatan community-based tourism, melakukan analisis dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal, atau mengembangkan produk wisata yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

Pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan karakteristik pendidikan vokasi yang menekankan learning by doing. Integrasi sustainability ke dalam pendidikan vokasi memungkinkan kompetensi keberlanjutan dibangun melalui kombinasi pembelajaran di kelas, project-based learning, industry attachment,

praktik kerja, studi kasus, dan penyelesaian permasalahan industri secara langsung. Dalam konteks ini, industri tidak hanya berperan sebagai tempat praktik mahasiswa, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran dan mitra dalam mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh industri pariwisata yang semakin berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, kurikulum dapat dikembangkan secara lebih responsif terhadap perkembangan industri sekaligus tetap memiliki orientasi jangka panjang terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara penelitian memandang kerja sama bilateral Indonesia–Swiss bukan semata-mata sebagai bentuk kerja sama pembangunan atau bantuan teknis di sektor pariwisata, tetapi sebagai proses pembangunan kapasitas (capacity development) yang berlangsung secara bertahap dari tingkat individu, organisasi, hingga institusi. Berdasarkan perkembangan kerja sama WISATA, SUSTOUR, STED, dan SS4C yang telah dibahas, terlihat adanya perubahan orientasi dari pengembangan destinasi wisata menuju penguatan sistem pendidikan vokasi kepariwisataan. Penelitian ini kemudian menggunakan tiga dimensi Capacity Development UNDP, yaitu individual capacity, organizational capacity, dan institutional capacity, untuk menjelaskan bagaimana perubahan tersebut berlangsung dan bagaimana pendidikan kepariwisataan ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan sustainable tourism.

Bagi Indonesia, kerja sama dengan Swiss menjadi pilihan yang strategis karena kedua negara memiliki kepentingan yang saling melengkapi. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, namun masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sistem pendidikan

kepariwisataan. Sebaliknya, Swiss memiliki pengalaman panjang dalam membangun pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri pariwisata global. Oleh karena itu, kerja sama bilateral di bidang pendidikan kepariwisataan menjadi wadah bagi Indonesia untuk mengadaptasi praktik-praktik terbaik (best practices) yang telah dikembangkan Swiss, baik dalam aspek kurikulum, metode pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, tata kelola kelembagaan, maupun hubungan antara institusi pendidikan dan industri. Pada akhirnya, pengembangan kurikulum pendidikan kepariwisataan berkelanjutan menjadi salah satu titik penting dalam melihat kontribusi kerja sama Indonesia–Swiss. Kurikulum berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan tujuan pembangunan pariwisata dengan kompetensi sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Apabila prinsip sustainable tourism diintegrasikan secara sistematis ke dalam learning outcomes, materi pembelajaran, praktik industri, project-based learning, dan assessment, maka pendidikan kepariwisataan tidak hanya menghasilkan lulusan yang siap bekerja, tetapi juga tenaga profesional yang mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya yang selama ini menjadi kelemahan utama pengembangan kurikulum di Indonesia

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada bagaimana cara melakukan interpretasi hubungan antara evolusi kerja sama bilateral dan proses pembangunan kapasitas pendidikan kepariwisataan. Dengan demikian, penelitian ini memilih kerja sama Indonesia–Swiss sebagai fokus utama karena kerja sama tersebut menunjukkan cakupan dampak yang multidimensional, yaitu tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi

pendidikan dan mendukung penguatan kelembagaan. Pola tersebut selaras dengan kerangka Capacity Development UNDP yang digunakan dalam penelitian, khususnya melalui dimensi individual capacity, organizational capacity, dan institutional capacity. Oleh karena itu, kerja sama Indonesia–Swiss memberikan ruang analisis yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana kerja sama bilateral dapat berkontribusi terhadap pembangunan kapasitas pendidikan vokasi sekaligus mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pendidikan pariwisata di Indonesia?
2. Bagaimana program kerja sama bilateral pendidikan kepariwisataan Indonesia-swiss di Indonesia?
3. Sejauh mana kerja sama pendidikan pariwisata Indonesia-swiss dapat mendukung pengembangan kapasitas pariwisata berkelanjutan?

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kerja sama bilateral Indonesia–Swiss dalam bidang pendidikan kepariwisataan sebagai instrumen penguatan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan pendidikan kepariwisataan di Indonesia. Fokus tersebut diarahkan pada bagaimana kerja sama bilateral dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan vokasi kepariwisataan agar mampu

menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri sekaligus memahami prinsip-prinsip sustainable tourism.

Penelitian mencakup periode 2024–2026, khususnya sejak penguatan kerja sama melalui berbagai program pendidikan dan pengembangan kapasitas yang melibatkan Pemerintah Indonesia, Swisscontact, SECO, serta institusi pendidikan kepariwisataan di kedua negara. Periode tersebut dipilih untuk melihat perkembangan dan implementasi kerja sama dalam konteks penguatan pendidikan vokasi serta upaya mengintegrasikan prinsip sustainable tourism ke dalam pendidikan kepariwisataan.

Analisis difokuskan pada kebijakan, program, dan implementasi kerja sama pendidikan kepariwisataan yang meliputi pengembangan kurikulum pendidikan kepariwisataan berkelanjutan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, transfer pengetahuan, pengembangan metode pembelajaran, industry attachment, project-based learning, serta penguatan pendidikan vokasi kepariwisataan di Indonesia. Pengembangan kurikulum menjadi salah satu fokus utama karena kurikulum merupakan instrumen penting dalam menerjemahkan kebutuhan industri dan prinsip sustainable tourism ke dalam kompetensi, materi pembelajaran, serta pengalaman belajar mahasiswa. Dalam konteks ini, penelitian memperhatikan sejauh mana kerja sama Indonesia–Swiss mendorong pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan, kebutuhan industri pariwisata, kompetensi praktis, dan kesiapan peserta didik menghadapi perubahan dalam sektor pariwisata.

Penelitian juga memperhatikan keterkaitan antara pengembangan kurikulum pendidikan kepariwisataan berkelanjutan dengan peningkatan kapasitas

tenaga pendidik dan institusi pendidikan. Kurikulum yang berorientasi pada sustainable tourism tidak hanya membutuhkan perubahan pada materi pembelajaran, tetapi juga memerlukan kemampuan tenaga pendidik dalam menyampaikan kompetensi keberlanjutan, dukungan institusi dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang relevan, serta keterlibatan industri dalam memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dianalisis sebagai bagian dari proses pembangunan kapasitas yang mencakup individual capacity, organizational capacity, dan institutional capacity.

Penelitian tidak membahas secara mendalam aspek teknis operasional destinasi wisata, pengelolaan destinasi secara langsung, maupun keseluruhan sistem pariwisata Swiss, melainkan menitikberatkan pada kontribusi kerja sama bilateral dalam pengembangan pendidikan kepariwisataan dan sumber daya manusia. Aspek sustainable tourism dalam penelitian ini ditempatkan terutama dalam perspektif pendidikan, khususnya bagaimana prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan hubungan antara institusi pendidikan dengan dunia industri.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, meliputi dokumen resmi pemerintah Indonesia dan Swiss, dokumen kerja sama pendidikan bilateral, laporan Swisscontact, laporan SECO, laporan organisasi internasional, artikel jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan pelaksanaan kerja sama pendidikan antara Indonesia dan Swiss. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan, program, bentuk implementasi, serta perubahan

kapasitas pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan kepariwisataan berkelanjutan.

Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara pendidikan kepariwisataan, pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis sustainable tourism, transfer pengetahuan, pembangunan kapasitas, dan penguatan keterkaitan antara institusi pendidikan dengan industri.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi kerja sama bilateral pendidikan kepariwisataan Indonesia–Swiss di Indonesia
2. Menganalisis proses transfer pengetahuan dan *capacity building* yang terjadi dalam kerja sama tersebut
3. Menganalisis kontribusi kerja sama tersebut terhadap pengembangan SDM pariwisata Indonesia yang mendukung pengembangan kapasitas *sustainable tourism* di Indonesia

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam bidang diplomasi pendidikan, kerja sama bilateral, dan *capacity building*.

2. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai transfer kebijakan (*policy transfer*), transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), dan *adaptive education transfer* dalam konteks kerja sama internasional.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan *sustainable tourism* dalam perspektif Hubungan Internasional.

Kegunaan Praktis

1. Memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan Tinggi, serta institusi pendidikan kepariwisataan dalam mengoptimalkan kerja sama internasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata.
2. Menjadi masukan bagi lembaga pendidikan kepariwisataan dalam mengembangkan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata berkelanjutan.
3. Memberikan referensi bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang mampu mendukung transformasi pariwisata Indonesia menuju *sustainable tourism*.
4. Mendukung upaya penguatan daya saing pariwisata Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas sumber daya manusia yang berstandar internasional.

1.5. Kerangka Teoretis-Konseptual

1.5.1. Kerjasama Bilateral dalam Pendidikan Kepariwisata

Kerjasama bilateral dalam pendidikan kepariwisataan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik pendidikan antarnegara. Kerjasama semacam ini menjadi penting karena perkembangan industri pariwisata menuntut tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu memenuhi standar kompetensi internasional. Penelitian mengenai pendidikan pariwisata di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap kompetensi yang diakui secara internasional mendorong adanya integrasi standar kompetensi, kurikulum, dan kerangka kualifikasi dengan standar regional maupun internasional (Yusra et al., 2022). Dalam konteks tersebut, kerjasama bilateral dapat menjadi sarana untuk mentransfer pengetahuan dan praktik pendidikan dari negara mitra kepada institusi pendidikan di negara penerima, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Salah satu bentuk kerjasama yang strategis adalah pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata. Kurikulum pendidikan pariwisata perlu terus diperbarui karena kebutuhan industri mengalami perubahan, terutama berkaitan dengan teknologi, kemampuan komunikasi, *problem solving*, kreativitas, serta keterampilan bekerja dalam lingkungan multikultural. Penelitian Mungai et al. (2022) menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi yang diberikan oleh lembaga pendidikan dengan keterampilan yang dibutuhkan industri pariwisata, sehingga diperlukan kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan pemangku kepentingan

industri dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut juga terlihat dalam kerja sama pendidikan pariwisata Indonesia dengan negara dan organisasi internasional, ketika berbagai standar kompetensi dan kurikulum pariwisata diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional untuk mempersiapkan lulusan menghadapi pasar kerja yang lebih luas (Yusra et al., 2022). Dengan demikian, kerja sama bilateral dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat relevansi kurikulum sekaligus meningkatkan kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.

Selain kurikulum, kerja sama bilateral juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pertukaran pengalaman, keterlibatan tenaga pendidik, *student exchange*, pelatihan, maupun pembelajaran berbasis pengalaman. Model pendidikan pariwisata internasional menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran yang melibatkan mitra dari negara lain dapat memperluas perspektif mahasiswa terhadap persoalan pariwisata sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan pariwisata (Building Bridges, 2020). Penelitian lain menunjukkan bahwa pembelajaran yang melibatkan mitra pariwisata internasional melalui proyek nyata dapat meningkatkan kemampuan *problem solving*, pengambilan keputusan, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas mahasiswa (Engaging Students Through Authentic Learning, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama bilateral tidak hanya menghasilkan transfer pengetahuan secara teoritis, tetapi juga dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih aplikatif dan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik.

Oleh karena itu, kerja sama bilateral dalam pendidikan kepariwisataan dapat dipandang sebagai bentuk penguatan kapasitas pendidikan yang mencakup

pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pembelajaran berbasis praktik, serta peningkatan keterhubungan antara institusi pendidikan dan industri. Kerja sama tersebut menjadi semakin relevan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan karena pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu memahami dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pembangunan pariwisata. Pengembangan pendidikan pariwisata berkelanjutan membutuhkan kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan kerja, tetapi juga pada pemahaman mengenai prinsip-prinsip keberlanjutan (Zain & Malihah, 2022). Dengan demikian, kerja sama bilateral dapat memberikan nilai strategis apabila tidak berhenti pada pertukaran peserta atau kegiatan pendidikan jangka pendek, tetapi menghasilkan transfer pengetahuan, penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi pendidik, serta adaptasi praktik pendidikan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam sistem pendidikan pariwisata nasional.

1.5.2 Sustainable tourism

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) berkembang sebagai paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Konsep ini berakar pada pendekatan *Triple Bottom Line* yang diperkenalkan oleh Elkington (1997), yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi (*profit*), tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*). Dalam perkembangannya, paradigma tersebut semakin terintegrasi dengan kerangka *Environmental, Social, and Governance*

(ESG) yang kini menjadi standar global dalam tata kelola pembangunan dan investasi berkelanjutan (Ahmed et al., 2021; Roblek, Meško, & Bach, 2021). Dalam sektor pariwisata, pendekatan ini mendorong destinasi untuk tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas pariwisata memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta melindungi warisan budaya yang menjadi identitas suatu daerah.

Urgensi penerapan pariwisata berkelanjutan semakin meningkat seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi industri pariwisata global. Pertumbuhan jumlah wisatawan yang tidak diimbangi dengan tata kelola yang memadai telah memunculkan berbagai persoalan seperti *overtourism*, degradasi lingkungan, peningkatan emisi karbon, eksploitasi sumber daya alam, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga marginalisasi masyarakat lokal dari manfaat ekonomi pariwisata (Hall, Scott, & Gössling, 2015). Di Indonesia, tantangan tersebut terlihat pada berbagai destinasi wisata yang menghadapi persoalan pengelolaan sampah, pencemaran kawasan pesisir dan laut, tekanan terhadap ekosistem konservasi, serta ketimpangan kapasitas kelembagaan dalam mengelola pertumbuhan sektor pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur atau regulasi, tetapi juga oleh kemampuan manusia dan institusi yang mengelola destinasi tersebut.

Dalam konteks global, pariwisata berkelanjutan juga telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan internasional melalui Sustainable Development Goals (SDGs). United Nations Tourism menegaskan bahwa sektor pariwisata

memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*), SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*), SDG 13 (*Climate Action*), SDG 14 (*Life Below Water*), dan SDG 15 (*Life on Land*) (UN Tourism, 2025). Posisi strategis tersebut menjadikan sektor pariwisata tidak lagi dipandang semata sebagai sektor ekonomi, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu mendorong konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi *sustainable tourism* memiliki implikasi yang jauh melampaui peningkatan pendapatan sektor wisata, karena berkaitan langsung dengan pencapaian agenda pembangunan global.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pariwisata berkelanjutan pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Shafieieh et al. (2024) menemukan bahwa tingkat *sustainability knowledge* memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang mendukung praktik pariwisata berkelanjutan. Individu yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi cenderung menunjukkan perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan aktivitas pariwisata. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan hanya persoalan kebijakan atau teknologi, melainkan juga persoalan kapasitas manusia dalam menerjemahkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam praktik sehari-hari.

Argumen tersebut diperkuat oleh Conefrey et al. (2025) yang menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan tenaga kerja yang

memiliki *sustainability literacy*, pemahaman terhadap isu perubahan iklim, serta kemampuan menerapkan strategi dekarbonisasi dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata. Seiring meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan, industri pariwisata membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis di bidang pelayanan dan manajemen destinasi, tetapi juga mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, keberhasilan transisi menuju pariwisata berkelanjutan sangat ditentukan oleh kemampuan suatu negara dalam membangun kapasitas manusia yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masa depan.

Konsep *sustainable tourism* berakar pada gagasan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang diperkenalkan melalui laporan *Our Common Future* oleh World Commission on Environment and Development (WCED, 1987). Dalam perkembangannya, prinsip keberlanjutan kemudian diadaptasi ke dalam sektor pariwisata melalui pendekatan *Triple Bottom Line* yang diperkenalkan oleh Elkington (1997). Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan ekonomi (*profit*), tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Dalam konteks pariwisata, pendekatan tersebut menuntut agar setiap aktivitas wisata memberikan manfaat ekonomi, mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

Seiring perkembangan tata kelola global, konsep keberlanjutan semakin terinstitusionalisasi melalui kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang banyak digunakan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pariwisata. Menurut Ahmed et al. (2021), pendekatan ESG menjadi standar baru

dalam mengukur keberhasilan pembangunan karena tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari suatu aktivitas. Dalam sektor pariwisata, prinsip ESG tercermin dalam upaya konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, perlindungan warisan budaya, transparansi tata kelola destinasi, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, *sustainable tourism* saat ini tidak hanya dipandang sebagai konsep normatif, tetapi telah berkembang menjadi standar tata kelola destinasi yang diakui secara global.

Sebagai standar internasional, implementasi *sustainable tourism* umumnya diukur melalui sejumlah indikator yang dikembangkan oleh berbagai organisasi internasional, salah satunya adalah **Global Sustainable Tourism Council (GSTC)**. GSTC menetapkan empat pilar utama yang menjadi acuan dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan, yaitu: (1) pengelolaan destinasi yang efektif (*sustainable management*), (2) manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal (*social and economic benefits*), (3) pelestarian warisan budaya (*cultural heritage preservation*), dan (4) perlindungan lingkungan (*environmental conservation*) (GSTC, 2024). Keempat pilar tersebut telah menjadi rujukan bagi banyak negara dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan internasional, *sustainable tourism* juga memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*. UN Tourism (2025) menegaskan bahwa sektor pariwisata berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian SDG 4 (*Quality Education*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 11 (*Sustainable Cities and Communities*), SDG

12 (*Responsible Consumption and Production*), SDG 13 (*Climate Action*), SDG 14 (*Life Below Water*), dan SDG 15 (*Life on Land*). Oleh karena itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya menjadi kebutuhan industri, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen global dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Penerapan *sustainable tourism* sebagai standar pembangunan menuntut tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keberlanjutan (*sustainability competencies*). Hall, Scott, dan Gössling (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, tata kelola destinasi, serta pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, pendidikan kepariwisataan memiliki posisi strategis dalam membentuk tenaga kerja yang mampu mengimplementasikan standar *sustainable tourism* secara efektif.

Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan pariwisata mulai bergeser dari pendekatan yang hanya menempatkan sustainable tourism sebagai materi atau mata kuliah tersendiri menuju pendekatan curriculum-wide sustainability integration. Fernández-Villarán et al. (2024) menunjukkan bahwa perubahan kebutuhan industri pariwisata menuntut pembaruan program pendidikan dengan mengintegrasikan keberlanjutan, transformasi digital, dan praktik yang bertanggung jawab secara sosial ke dalam struktur kurikulum. Kurikulum yang relevan tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai keberlanjutan, tetapi juga mengembangkan critical thinking, strategic thinking, soft skills, sikap, dan kemampuan mengambil keputusan untuk

menghadapi persoalan pariwisata yang kompleks. Pengembangan tersebut idealnya dilakukan berdasarkan kebutuhan industri, masukan alumni, serta keterlibatan pelaku industri dan komunitas, sehingga kompetensi keberlanjutan yang dibangun dalam pendidikan memiliki relevansi langsung dengan persoalan nyata di destinasi.

Arah pembaruan tersebut juga sejalan dengan pendekatan UNESCO (2024) yang menempatkan pendidikan untuk keberlanjutan dalam tiga ranah pembelajaran, yaitu cognitive, social-emotional, dan behavioural. Dalam konteks pendidikan pariwisata, pendekatan tersebut berarti kurikulum tidak cukup hanya memberikan pemahaman mengenai dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari pariwisata, tetapi juga perlu membangun kemampuan berkolaborasi dengan masyarakat, memahami keberagaman dan tanggung jawab antargenerasi, serta menerjemahkan pengetahuan menjadi tindakan yang bertanggung jawab. Temuan terbaru dalam pendidikan pariwisata bahkan menunjukkan bahwa sustainability competencies dapat diintegrasikan secara sistematis ke dalam learning outcomes, materi, pedagogi, dan assessment, sehingga keberlanjutan menjadi bagian dari keseluruhan program pendidikan, bukan sekadar topik tambahan dalam kurikulum. Dengan demikian, pembaruan kurikulum pendidikan kepariwisataan perlu diarahkan pada pembentukan lulusan yang mampu menghubungkan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan tindakan dalam merancang serta mengelola aktivitas pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, *sustainable tourism* dalam penelitian ini dipahami sebagai standar pembangunan pariwisata yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan melalui tata kelola destinasi yang berkelanjutan. Standar tersebut menjadi landasan normatif bagi pengembangan

pendidikan pariwisata yang menjadi fokus kerja sama bilateral Indonesia–Swiss. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan kepariwisataan dipandang sebagai prasyarat penting dalam mendukung implementasi *sustainable tourism* di destinasi wisata di seluruh Indonesia sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan pariwisata berkelanjutan

1.5.3. Diplomasi Pendidikan

Diplomasi merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan hubungan internasional. Secara tradisional, diplomasi dipahami sebagai proses komunikasi, negosiasi, dan representasi yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui cara-cara damai. Menurut Berridge (2015), diplomasi adalah pengelolaan hubungan internasional melalui negosiasi serta metode lain yang dilakukan oleh perwakilan resmi negara. Dalam perkembangannya, praktik diplomasi tidak lagi terbatas pada isu politik dan keamanan, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, budaya, pendidikan, lingkungan, dan pembangunan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi modern semakin menekankan penggunaan instrumen non-koersif untuk membangun hubungan antarnegara dan mencapai tujuan bersama.

Perluasan ruang lingkup diplomasi melahirkan konsep diplomasi publik (*public diplomacy*), yaitu upaya suatu negara untuk memengaruhi persepsi, pemahaman, dan hubungan dengan masyarakat negara lain melalui berbagai aktivitas non-politik. Nye (2004) menjelaskan bahwa diplomasi publik merupakan bagian penting dari *soft power*, yaitu kemampuan suatu negara untuk memperoleh hasil yang diinginkan melalui daya tarik (*attraction*) dibandingkan paksaan

(*coercion*) atau pembayaran (*payment*). Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu sumber *soft power* yang paling efektif karena mampu membangun hubungan jangka panjang, menciptakan pertukaran pengetahuan, serta meningkatkan pemahaman dan kepercayaan antarnegara.

Berdasarkan perkembangan tersebut, muncul konsep diplomasi pendidikan (*educational diplomacy*) yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen hubungan internasional. Menurut Knight (2020), diplomasi pendidikan merupakan penggunaan kerja sama pendidikan, pertukaran pengetahuan, mobilitas akademik, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi kelembagaan untuk memperkuat hubungan antarnegara sekaligus mendukung tujuan pembangunan bersama. Diplomasi pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membangun jaringan internasional, memperluas kerja sama antar lembaga, dan memperkuat hubungan politik serta sosial antara negara-negara yang terlibat.

Dalam perspektif hubungan internasional kontemporer, diplomasi pendidikan menjadi semakin penting karena pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui kerja sama pendidikan, negara dapat mentransfer pengetahuan, teknologi, pengalaman, serta praktik terbaik yang telah terbukti berhasil diterapkan dalam konteks domestik. Menurut Scott-Smith (2018), diplomasi pendidikan memungkinkan terjadinya *knowledge transfer* dan *capacity transfer* yang berkontribusi terhadap pembangunan jangka panjang di negara mitra. Oleh karena itu, pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai sektor sosial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang dapat menghasilkan manfaat politik, ekonomi, dan pembangunan.

1.5.4. Pendidikan Kepariwisataan Berbasis Sustainable tourism

Dalam konteks tersebut, kurikulum pendidikan pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu bentuk konkret dari proses capacity building pada tingkat organisasi dan institusional. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat untuk menentukan materi pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk menerjemahkan kebutuhan pembangunan pariwisata berkelanjutan ke dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan. Studi Fernández-Villarán, Guereño-Omil, dan Ageitos (2024) menunjukkan bahwa perkembangan industri pariwisata menuntut pembaruan kurikulum yang mengintegrasikan sustainability, transformasi digital, tanggung jawab sosial, critical thinking, dan strategic thinking. Dalam pendekatan tersebut, keberlanjutan tidak ditempatkan hanya sebagai satu mata kuliah atau materi tambahan, tetapi diintegrasikan ke dalam keseluruhan pengalaman pendidikan melalui learning outcomes, pengetahuan, keterampilan, sikap, praktik profesional, dan pengalaman lapangan. Pengembangan kurikulum juga perlu melibatkan industri, alumni, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya agar kompetensi yang dihasilkan sesuai dengan perubahan kebutuhan sektor pariwisata.

Dengan demikian, kurikulum pariwisata berkelanjutan dapat dipahami sebagai kurikulum yang secara sistematis membentuk sustainability competencies, yaitu kemampuan mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pembangunan pariwisata serta menerjemahkan pemahaman tersebut ke dalam pengambilan keputusan dan tindakan profesional. Kompetensi tersebut mencakup antara lain systems thinking, strategic thinking, anticipatory thinking, critical thinking, kolaborasi, pemecahan

masalah secara terpadu, dan kemampuan mengevaluasi konsekuensi jangka panjang dari keputusan pariwisata. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai keberlanjutan perlu diikuti dengan kemampuan berpikir kritis agar mahasiswa mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut menjadi keputusan yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum tidak cukup dilakukan dengan menambahkan mata kuliah sustainable tourism, tetapi perlu dilakukan melalui mainstreaming sustainability ke dalam berbagai mata kuliah dan aktivitas pembelajaran, termasuk destination management, hospitality management, tourism planning, tourism business, community-based tourism, pengelolaan sumber daya, serta praktik industri.

Dalam perspektif capacity building, perubahan tersebut menunjukkan hubungan antara peningkatan kapasitas individu dan perubahan kapasitas organisasi. Pada tingkat *Individual Capacity*, kurikulum berkelanjutan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan mahasiswa serta tenaga pendidik dalam memahami dan menerapkan prinsip sustainable tourism. Pada tingkat *Organizational Capacity*, pengembangan kurikulum mendorong perguruan tinggi untuk memperbarui struktur program pendidikan, metode pembelajaran, sistem assessment, kompetensi dosen, fasilitas pembelajaran, serta mekanisme kerja sama dengan industri. Sementara itu, pada *tingkat Institutional Capacity*, kurikulum menjadi bagian dari proses yang lebih luas dalam membangun sistem pendidikan kepariwisataan yang selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan, kebutuhan industri, standar kompetensi, serta agenda pembangunan nasional dan global. Penelitian mengenai keselarasan kurikulum pariwisata dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menunjukkan pentingnya

menghubungkan programme learning outcomes dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga sustainability dapat menjadi bagian yang terukur dari proses pendidikan, bukan sekadar nilai normatif.

Lebih lanjut, kurikulum pendidikan pariwisata berkelanjutan perlu mengubah orientasi pembelajaran dari *content-based curriculum* menuju *competency- and outcome-based curriculum*. Dalam pendekatan ini, pertanyaan utama bukan hanya mengenai materi apa yang harus dipelajari mahasiswa, tetapi kompetensi apa yang harus dimiliki setelah menyelesaikan pendidikan dan bagaimana kompetensi tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Mahasiswa perlu memperoleh pengalaman untuk menganalisis persoalan seperti *overtourism*, perubahan iklim, penggunaan energi dan air, pengelolaan limbah, perlindungan biodiversitas, pelestarian warisan budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, pemerataan manfaat ekonomi, serta pengembangan destinasi yang inklusif. Karena persoalan tersebut bersifat kompleks dan saling berhubungan, pembelajaran perlu menggunakan pendekatan *project-based learning*, *problem-based learning*, *case study*, *community-based learning*, *industry attachment*, dan pembelajaran berbasis destinasi. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa menghubungkan teori dengan persoalan aktual sekaligus membangun kemampuan untuk merancang solusi yang mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks kerja sama Indonesia–Swiss, pengembangan kurikulum tersebut menjadi bentuk penting dari transfer pengetahuan dan institutional best practices. Pengalaman Swiss dalam pendidikan vokasi yang mengintegrasikan pembelajaran dengan dunia industri dapat diadaptasi untuk memperkuat kurikulum pendidikan kepariwisataan Indonesia, tetapi proses tersebut perlu dilakukan melalui

adaptation dan contextualization, bukan sekadar mengadopsi model Swiss secara langsung. Prinsip industry-based learning, dual learning, praktik kerja, keterlibatan profesional, dan pembelajaran berbasis kompetensi dapat dikombinasikan dengan kebutuhan Indonesia yang memiliki karakteristik destinasi, budaya, struktur industri, serta persoalan keberlanjutan yang berbeda. Dengan demikian, kerja sama bilateral dapat menghasilkan capacity development yang bersifat lebih berkelanjutan karena pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari mitra internasional kemudian dilembagakan ke dalam kurikulum, proses pembelajaran, kapasitas tenaga pendidik, serta hubungan institusi pendidikan dengan industri.

Dengan demikian, pembaruan kurikulum pendidikan pariwisata berkelanjutan dapat ditempatkan sebagai salah satu indikator penting keberhasilan *capacity building* dalam kerja sama Indonesia–Swiss. Keberhasilan kerja sama tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa atau dosen yang mengikuti pelatihan, jumlah program yang dilaksanakan, atau peningkatan keterampilan individu, tetapi juga dari sejauh mana pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dapat menghasilkan perubahan pada kurikulum dan sistem pendidikan. Apabila prinsip sustainable tourism berhasil diintegrasikan ke dalam *learning outcomes*, materi, metode pembelajaran, praktik industri, *assessment*, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan, maka kerja sama tersebut telah bergerak dari individual capacity development menuju *organizational* dan *institutional capacity development*. Pada tahap inilah pendidikan kepariwisataan berfungsi sebagai mekanisme strategis untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tidak berhenti pada kebijakan pembangunan pariwisata, tetapi diterjemahkan menjadi kompetensi

sumber daya manusia yang akan mengelola sektor pariwisata di masa depan. Tiga kapasitas UNDP yang dikembangkan adalah:

1. *Kapasitas Individu (Individual Capacity)*

Kapasitas individu merujuk pada kemampuan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif (UNDP, 2009). Dalam konteks pendidikan kepariwisataan, kapasitas individu menjadi fondasi utama karena kualitas sumber daya manusia menentukan keberhasilan pengelolaan destinasi wisata maupun implementasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Pembangunan kapasitas pada tingkat individu umumnya dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan profesional, sertifikasi, dan transfer pengetahuan.

Pada sektor pendidikan pariwisata, penguatan kapasitas individu dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pelatihan berbasis industri, sertifikasi internasional, pengembangan kemampuan pedagogis, serta peningkatan kompetensi mahasiswa yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata modern. Selain itu, proses *knowledge transfer* atau transfer pengetahuan dari institusi yang lebih maju kepada institusi mitra juga menjadi bagian penting dari pembangunan kapasitas individu. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki literasi keberlanjutan (*sustainability literacy*) yang diperlukan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

2. *Kapasitas Organisasi (Organizational Capacity)*

Dimensi kedua adalah kapasitas organisasi, yaitu kemampuan suatu organisasi untuk menjalankan fungsi, mencapai tujuan, mengelola sumber daya, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan secara efektif (UNDP, 2009). Kapasitas organisasi mencakup aspek tata kelola, kepemimpinan, struktur organisasi, manajemen sumber daya, mekanisme koordinasi, serta hubungan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam konteks pendidikan kepariwisataan, kapasitas organisasi tercermin pada kemampuan institusi pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Penguatan kapasitas organisasi dapat dilakukan melalui pengembangan tata kelola lembaga pendidikan, peningkatan kualitas manajemen akademik, penguatan kerja sama dengan sektor industri, serta pengembangan sistem pembelajaran berbasis praktik. Salah satu bentuk yang banyak diterapkan dalam pendidikan vokasi pariwisata adalah pengembangan sistem magang (*internship system*) dan *industry linkage*, yaitu keterhubungan yang kuat antara institusi pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Hubungan tersebut memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman praktis yang relevan sekaligus mempersempit kesenjangan antara kebutuhan industri dan output pendidikan.

3. *Kapasitas Institusional (Institutional Capacity)*

Kapasitas institusional merupakan kemampuan yang berada pada tingkat sistem, meliputi kebijakan, regulasi, norma, nilai, dan kerangka

kelembagaan yang mengatur jalannya suatu organisasi maupun sektor pembangunan secara keseluruhan (UNDP, 2009). Dimensi ini menekankan pentingnya lingkungan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan hasil-hasil pembangunan kapasitas pada tingkat individu dan organisasi.

Dalam sektor pendidikan pariwisata, kapasitas institusional dapat diwujudkan melalui pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan tantangan global, pembentukan kebijakan pendidikan yang adaptif, serta integrasi standar internasional ke dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu contoh penguatan kapasitas institusional adalah adopsi model *Dual Vocational Education and Training* (dVET) yang dikembangkan Swiss. Model ini mengintegrasikan pendidikan formal dengan pengalaman kerja di industri sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional secara seimbang. Selain itu, kapasitas institusional juga mencakup integrasi prinsip-prinsip *sustainable tourism* ke dalam kurikulum, kebijakan pendidikan, dan sistem pembelajaran. Integrasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pendidikan kepariwisataan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga individu yang memiliki kesadaran terhadap pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 1.2.
Tiga Dimensi *Capacity building* Menurut UNDP (2009)

Dimensi <i>Capacity building</i>	Definisi	Karakteristik Utama	Tujuan Pengembangan Kapasitas
<i>Individual Capacity</i> (Kapasitas Individu)	Kapasitas individu merupakan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Pengembangan kapasitas individu dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, pembelajaran, dan pengalaman kerja.	• Pengetahuan (<i>knowledge</i>)• - Keterampilan (<i>skills</i>)• - Kompetensi (<i>competencies</i>)• - Sikap (<i>attitudes</i>)• - Pengalaman (<i>experience</i>)• - Kepemimpinan (<i>leadership</i>)	Meningkatkan kemampuan individu agar mampu bekerja secara profesional, adaptif, inovatif, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi maupun pembangunan.
<i>Organizational Capacity</i> (Kapasitas Organisasi)	Kapasitas organisasi merupakan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, struktur, sistem, proses kerja, kepemimpinan, dan hubungan internal agar mampu menjalankan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.	• Struktur organisasi• - Tata kelola (<i>governance</i>)• - Kepemimpinan (<i>leadership</i>)• - Manajemen sumber daya• - Sistem kerja• - Budaya organisasi• - Mekanisme koordinasi	Memperkuat efektivitas organisasi sehingga mampu memberikan pelayanan, menjalankan fungsi kelembagaan, serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.
<i>Institutional Capacity</i> (Kapasitas Institusional)	Kapasitas institusional merupakan kemampuan lingkungan kelembagaan yang mencakup kebijakan, regulasi, norma, jejaring, sistem hukum, mekanisme koordinasi, serta hubungan antarorganisasi yang memungkinkan individu dan organisasi berkembang secara berkelanjutan.	• Kebijakan publik• - Regulasi• - Norma dan nilai sosial• - Sistem hukum• - Jejaring kelembagaan• - Kemitraan• - Koordinasi lintas sektor	Menciptakan lingkungan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan pembangunan melalui kebijakan yang efektif, koordinasi antarlembaga, dan kemitraan yang kuat.

Sumber: UNDP.org (2029), <https://www.adaptation-undp.org/resources/capacity-development-undp-primer-undp-2009>

Dalam praktik kerja sama pembangunan internasional, tidak semua negara memiliki kapasitas yang sama untuk berperan sebagai penyedia (*provider*) pembangunan kapasitas (*capacity building*). Sesuai tabel di atas, *Capacity Development* dapat dipahami sebagai proses penguatan kapasitas yang berlangsung pada tiga tingkatan yang saling berkaitan. *Individual capacity* berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan pengalaman individu.

Organizational capacity menekankan penguatan struktur, tata kelola, sistem kerja, dan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Sementara itu, *institutional capacity* mencakup penguatan kebijakan, regulasi, jejaring, kemitraan, serta koordinasi antarlembaga. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana kerja sama Indonesia–Swiss dalam pendidikan kepariwisataan tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat institusi pendidikan dan lingkungan kelembagaan yang mendukung pengembangan *sustainable tourism*.

Swiss merupakan salah satu negara yang secara konsisten menempatkan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan vokasi sebagai instrumen penting kerja sama internasionalnya. Melalui lembaga seperti *Swiss Agency for Development and Cooperation* (SDC), *State Secretariat for Economic Affairs* (SECO), dan *Swisscontact*, Swiss telah mengembangkan berbagai program penguatan pendidikan, keterampilan kerja, dan hubungan antara pendidikan dengan dunia usaha di berbagai negara sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut tidak hanya menempatkan bantuan pembangunan sebagai transfer sumber daya finansial, tetapi juga sebagai proses transfer pengetahuan, kompetensi, pengalaman, model kelembagaan, dan praktik terbaik yang dapat memperkuat kemampuan negara mitra untuk mengembangkan sistemnya secara mandiri. Dalam konteks pendidikan vokasi, pendekatan tersebut menjadi semakin penting karena perubahan teknologi, digitalisasi, dan transisi menuju ekonomi hijau menyebabkan kebutuhan kompetensi tenaga kerja berkembang secara cepat. OECD (2025) menegaskan bahwa sistem pendidikan vokasi perlu memperbarui kurikulum berdasarkan perubahan kebutuhan pasar kerja

dan mengintegrasikan keterampilan yang relevan dengan transisi hijau ke dalam berbagai program pendidikan.

Keunggulan Swiss sebagai *provider* pembangunan kapasitas juga berkaitan erat dengan karakter sistem pendidikan vokasinya yang memiliki hubungan kuat dengan dunia industri. Sistem VET Swiss menggunakan kurikulum yang bersifat terstandar secara nasional dan berbasis kompetensi, sementara penyusunannya melibatkan pemerintah, kanton, dan organisasi profesi. Dengan demikian, kurikulum tidak dikembangkan hanya berdasarkan perspektif lembaga pendidikan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan profesi serta dunia kerja. OECD (2025) menunjukkan bahwa sekitar sembilan dari sepuluh peserta VET tingkat menengah atas di Swiss mengikuti sistem apprenticeship, sementara pendidikan sekolah, perusahaan pelatihan, dan pusat pelatihan yang dikelola asosiasi industri berperan secara bersama-sama dalam pembentukan kompetensi. Struktur tersebut menjadikan kurikulum sebagai penghubung antara pembelajaran teoritis, keterampilan praktis, standar profesi, dan kebutuhan pasar kerja.

Keunggulan Swiss dalam bidang pendidikan kepariwisataan tidak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai salah satu negara yang memiliki tradisi panjang dalam pendidikan *hospitality* dan *tourism management*. Pengalaman tersebut berkembang melalui sistem pendidikan yang menempatkan hubungan antara institusi pendidikan dan dunia industri sebagai bagian penting dari proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan kepariwisataan, pendekatan tersebut memungkinkan kompetensi lulusan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata sektor *hospitality* dan *tourism*, bukan semata-mata berdasarkan pengetahuan akademik. Relevansi industri tersebut menjadi semakin penting ketika sektor

pariwisata mengalami perubahan menuju pelayanan yang lebih digital, inklusif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keunggulan pendidikan kepariwisataan Swiss tidak hanya terletak pada reputasi institusi pendidikan, tetapi juga pada kemampuan menghubungkan proses pendidikan dengan kebutuhan profesional dan perkembangan industri.

Salah satu karakteristik utama sistem pendidikan Swiss adalah penerapan *Dual Vocational Education and Training* (dVET) yang mengintegrasikan pembelajaran di institusi pendidikan dengan pengalaman kerja langsung di industri. Sistem tersebut memungkinkan peserta didik memperoleh kompetensi teknis, pengalaman profesional, dan pemahaman terhadap budaya kerja secara simultan. Dalam pendekatan ini, praktik industri bukan sekadar pelengkap setelah mahasiswa memperoleh pengetahuan di kelas, tetapi merupakan bagian dari proses pembentukan kompetensi. Kurikulum kemudian berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan di institusi pendidikan, pengalaman yang diperoleh di tempat kerja, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh profesi saling terhubung. Model Swiss tersebut menjadi relevan bagi kerja sama pendidikan internasional karena memberikan contoh bagaimana pendidikan dapat dirancang agar lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan industri.

Dalam perspektif pembangunan kapasitas, karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kurikulum merupakan salah satu instrumen penting dalam proses *capacity development*. Kurikulum menentukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi yang harus dibentuk melalui pendidikan. Oleh karena itu, transfer kapasitas dari Swiss kepada Indonesia tidak hanya berupa pelatihan bagi mahasiswa atau dosen, tetapi juga dapat berlangsung melalui transfer metode

penyusunan kurikulum, *learning outcomes*, standar kompetensi, metode pembelajaran, sistem *assessment*, mekanisme praktik industri, dan pola keterlibatan dunia usaha dalam pendidikan. Dengan demikian, perubahan kurikulum dapat menjadi bukti bahwa transfer pengetahuan internasional telah menghasilkan perubahan pada tingkat organisasi dan institusi, bukan hanya pada tingkat individu.

Dalam konteks pariwisata, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena *sustainable tourism* membutuhkan jenis kompetensi yang lebih luas dibandingkan keterampilan pelayanan konvensional. Tenaga kerja pariwisata perlu memahami hubungan antara kegiatan ekonomi pariwisata dengan konservasi lingkungan, masyarakat lokal, budaya, penggunaan sumber daya, dan kualitas hidup destinasi. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan pariwisata berkelanjutan perlu mengintegrasikan *sustainability competencies* ke dalam proses pendidikan. Kompetensi tersebut dapat mencakup kemampuan *systems thinking*, *critical thinking*, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya secara efisien, serta kemampuan mengantisipasi dampak jangka panjang dari aktivitas pariwisata. Dalam konteks VET secara lebih luas, OECD (2025) menekankan pentingnya penyelarasan kurikulum dengan *green skills* dan pengembangan kompetensi yang memungkinkan lulusan beradaptasi terhadap transisi ekonomi menuju sistem yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, kurikulum pariwisata berkelanjutan tidak seharusnya dipahami hanya sebagai penambahan mata kuliah *sustainable tourism*. Pendekatan yang lebih komprehensif adalah *mainstreaming sustainability*, yaitu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam keseluruhan struktur kurikulum.

Pada tingkat *learning outcomes*, lulusan diharapkan tidak hanya mampu memberikan pelayanan wisata, tetapi juga mampu merancang dan mengelola aktivitas pariwisata dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pada tingkat materi, keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam *destination management, hospitality management, tourism planning, community-based tourism, responsible tourism*, pengelolaan energi dan air, *waste management*, konservasi, pelestarian budaya, dan pengembangan ekonomi lokal. Pada tingkat pedagogi, mahasiswa dapat dilibatkan dalam *project-based learning, problem-based learning, case study, community-based learning*, dan *industry attachment*. Sementara itu, *assessment* perlu diarahkan untuk mengukur kemampuan mahasiswa menerapkan prinsip keberlanjutan dalam menyelesaikan persoalan pariwisata yang nyata.

Pendekatan tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan pengalaman Swiss dalam mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri. Kurikulum VET Swiss secara formal mengidentifikasi keterampilan dan *learning outcomes* yang harus dikuasai peserta didik serta membagi proses pembentukannya antara sekolah vokasi, perusahaan, dan pusat pelatihan industri. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa kurikulum dapat berfungsi sebagai mekanisme koordinasi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks pariwisata Indonesia, prinsip tersebut dapat diadaptasi dengan menghubungkan perguruan tinggi atau politeknik pariwisata, hotel, restoran, biro perjalanan, pengelola destinasi, pemerintah daerah, komunitas lokal, dan asosiasi industri dalam proses pengembangan kompetensi. Dengan cara

tersebut, kurikulum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan industri sekaligus lebih mampu memasukkan persoalan keberlanjutan yang dihadapi oleh destinasi.

Selain keberhasilannya di dalam negeri, Swiss juga memiliki pengalaman panjang dalam mengimplementasikan program pembangunan kapasitas pendidikan dan keterampilan kerja di berbagai negara. Melalui Swisscontact, berbagai proyek dikembangkan dengan menekankan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kapasitas tidak berhenti pada pemberian pelatihan, tetapi diarahkan pada penguatan kemampuan lembaga untuk secara terus-menerus menghasilkan pendidikan yang relevan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini terlihat dalam pengembangan kurikulum berbasis industri dan penguatan penyedia pendidikan vokasi. Swisscontact melaporkan bahwa melalui berbagai proyek keterampilan, sejumlah program studi telah dikembangkan secara bersama antara politeknik dan sektor swasta, disertai penguatan *structured internship* dan pelatihan *in-company trainers*.

Dalam sektor pariwisata, pendekatan tersebut secara khusus terlihat melalui program *Sustainable Tourism Education Development* (STED). Program STED dirancang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pariwisata melalui pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan industri (*demand-driven education*), sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan standar sektor pariwisata sekaligus memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sustainability dan inclusion. Program ini juga tidak hanya menyangkut mahasiswa atau peserta didik, tetapi memperkuat jaringan institusi pendidikan pariwisata sehingga hasil

intervensi dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap sistem TVET Indonesia.

Aspek kurikulum dalam STED menjadi penting karena menunjukkan bagaimana *capacity building* diterjemahkan ke dalam perubahan konkret pada proses pendidikan. Program WISATA sebelumnya telah memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas guru, pengembangan bahan ajar, peningkatan fasilitas pendidikan, serta penguatan hubungan antara SMK dan industri. Pada tingkat pendidikan tinggi, dukungan diarahkan antara lain pada pengembangan kurikulum dan peningkatan keahlian tenaga pengajar melalui hubungan dengan institusi pendidikan di Swiss dan mitra lainnya. Dengan demikian, pengalaman Indonesia–Swiss menunjukkan kesinambungan intervensi: pembangunan destinasi, peningkatan kapasitas pendidikan, pengembangan kurikulum, dan penguatan hubungan pendidikan-industri ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan pariwisata.

Lebih jauh, keterkaitan antara kurikulum dan industri dalam kerja sama tersebut bukan hanya bersifat konseptual. Dalam implementasi STED, keterlibatan tenaga ahli industri menghasilkan masukan langsung terhadap kurikulum dan pelatihan, sehingga institusi pendidikan memperoleh program pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan aktual. Swisscontact mencatat bahwa kerja sama antara industri dan politeknik menghasilkan kurikulum pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor serta meningkatkan kesiapan tenaga pengajar. Hal ini menunjukkan bahwa *industry-based curriculum* dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi kesenjangan antara kompetensi lulusan dan tuntutan pekerjaan.

Dalam perkembangan berikutnya, pendekatan tersebut dilanjutkan melalui *Swiss Skills for Competitiveness* (SS4C) periode 2024–2027. SS4C menggabungkan hasil proyek *Skills for Competitiveness* dan STED sebelumnya serta melanjutkan penguatan penyedia dVET melalui beberapa komponen utama, yaitu *industry-based curriculum*, tenaga pengajar dan instruktur yang kompeten, serta fasilitas praktik yang relevan dengan sektor industri. Pada sektor pariwisata, STED menjadi salah satu komponen yang diteruskan dalam kerangka tersebut bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan demikian, periode 2024–2027 dapat dipandang bukan sebagai awal kerja sama baru yang terpisah, tetapi sebagai tahap penguatan dan pelembagaan hasil pembangunan kapasitas yang telah dikembangkan sejak fase sebelumnya.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kurikulum menjadi salah satu titik temu antara *capacity building*, pendidikan vokasi, kebutuhan industri, dan *sustainable tourism*. Pada tingkat *Individual Capacity*, kurikulum yang diperbarui membentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan *sustainability competencies* mahasiswa serta tenaga pendidik. Pada tingkat *Organizational Capacity*, proses pengembangan kurikulum meningkatkan kemampuan institusi pendidikan dalam merancang program studi, mengembangkan bahan ajar, melaksanakan pembelajaran berbasis praktik, melakukan *assessment*, dan membangun kemitraan dengan industri. Pada tingkat *Institutional Capacity*, kurikulum yang telah diperbarui dan diadopsi ke dalam sistem pendidikan menjadi instrumen untuk menyelaraskan pendidikan kepariwisataan dengan standar kompetensi, kebutuhan industri, kebijakan nasional, serta agenda pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Dari perspektif Hubungan Internasional, proses tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *capacity building diplomacy*, yaitu pemanfaatan hubungan kerja sama internasional untuk memperkuat kemampuan domestik melalui transfer pengetahuan, kompetensi, pengalaman, dan praktik kelembagaan. Dalam model tersebut, keberhasilan kerja sama tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya bantuan atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi oleh kemampuan negara penerima untuk menginternalisasi pengetahuan dan mengubahnya menjadi kapasitas domestik yang dapat dipertahankan. Kurikulum menjadi salah satu indikator penting karena perubahan kurikulum menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui kerja sama telah diterjemahkan menjadi perubahan dalam sistem pendidikan.

Dalam konteks penelitian ini, kerja sama Indonesia–Swiss karena itu dapat dianalisis tidak hanya berdasarkan peningkatan keterampilan individu, tetapi juga berdasarkan sejauh mana kerja sama tersebut menghasilkan transformasi pada kurikulum pendidikan kepariwisataan. Transformasi tersebut mencakup pergeseran dari kurikulum yang berorientasi pada keterampilan operasional menuju kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri; integrasi prinsip *sustainable tourism* dan *green skills*; peningkatan pembelajaran berbasis praktik dan pengalaman industri; peningkatan kapasitas dosen dan instruktur; serta penguatan mekanisme kolaborasi antara institusi pendidikan, industri, pemerintah, dan pemangku kepentingan destinasi. Dengan demikian, kurikulum dapat ditempatkan sebagai *bridge* yang menghubungkan *knowledge transfer* dari Swiss dengan pembangunan kapasitas domestik Indonesia.

Pada akhirnya, kontribusi kerja sama Indonesia–Swiss dalam pendidikan kepariwisataan tidak hanya terletak pada peningkatan kualitas lulusan, tetapi juga pada kemampuan kerja sama tersebut untuk membangun sistem pendidikan yang mampu memperbarui dirinya sesuai dengan perubahan kebutuhan pariwisata. Kurikulum yang berbasis industri sekaligus berorientasi pada sustainability memungkinkan lulusan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan profesional sekaligus memahami konsekuensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari aktivitas pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum pariwisata berkelanjutan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk paling konkret dari *capacity building*, karena proses tersebut mengubah transfer pengetahuan internasional menjadi kompetensi individu, kemampuan organisasi pendidikan, dan kapasitas kelembagaan yang dapat mendukung pembangunan *sustainable tourism* Indonesia dalam jangka panjang.

1.6. Asumsi

Penelitian ini berasumsi bahwa kerja sama bilateral di bidang pendidikan kepariwisataan antara Indonesia dan Swiss merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata Indonesia melalui proses *capacity building*, *knowledge transfer*, pengembangan kompetensi, pembaruan kurikulum, serta penguatan kelembagaan pendidikan vokasi.

Penelitian ini secara khusus berasumsi bahwa kurikulum merupakan salah satu instrumen utama dalam menerjemahkan hasil kerja sama bilateral menjadi kapasitas domestik yang berkelanjutan. Kurikulum pendidikan kepariwisataan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen yang mengatur materi pembelajaran, tetapi

juga sebagai mekanisme untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan sesuai dengan perkembangan industri.

Pengembangan kurikulum tersebut diasumsikan berlangsung melalui proses adaptasi terhadap praktik pendidikan vokasi Swiss, terutama prinsip *competency-based education*, *industry-based learning*, *Dual Vocational Education and Training* (dVET), *project-based learning*, dan keterlibatan dunia industri dalam pengembangan kompetensi.

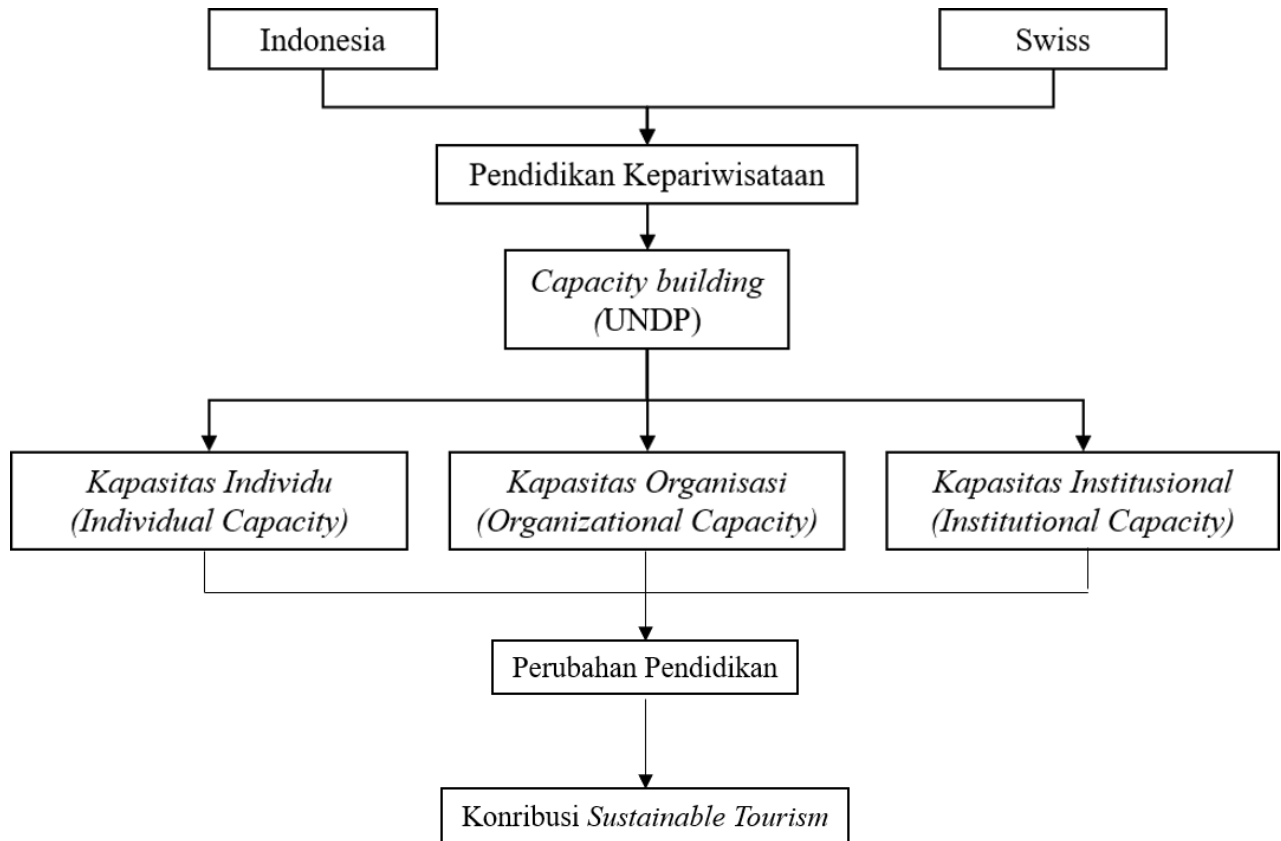
Penelitian ini juga berasumsi bahwa penguatan kapasitas pada tingkat individu, organisasi, dan institusi sebagaimana dijelaskan dalam teori *Capacity Building* UNDP (2009) saling berhubungan dan dapat tercermin melalui proses pengembangan kurikulum.

Lebih lanjut, penelitian ini berasumsi bahwa pengembangan kurikulum pariwisata berkelanjutan akan meningkatkan relevansi pendidikan dengan perubahan kebutuhan industri pariwisata. Dalam konteks tersebut, hubungan antara institusi pendidikan dan industri menjadi komponen penting dalam pengembangan kurikulum. Penelitian ini berasumsi bahwa keterlibatan industri memungkinkan institusi pendidikan memperoleh informasi mengenai perubahan kebutuhan kompetensi dan perkembangan praktik profesional secara lebih cepat.

Lebih lanjut, penelitian ini berasumsi bahwa penguatan kapasitas pendidikan melalui kurikulum berkelanjutan memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pembangunan pariwisata Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan prinsip *sustainable tourism* ditransformasikan dari kebijakan dan norma pembangunan menjadi kompetensi praktis yang dimiliki oleh sumber daya manusia.

1.7. Kerangka Analisis

Gambar 1.1.
Kerangka Analisis



Bagan kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian berangkat dari adanya kerja sama antara Indonesia dan Swiss dalam bidang pendidikan kepariwisataan. Kerja sama tersebut menjadi fokus penelitian untuk melihat bagaimana kedua negara berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan kepariwisataan melalui berbagai program pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pendidikan.

Untuk menganalisis implementasi kerja sama tersebut, penelitian ini menggunakan teori Capacity Building yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Teori ini memandang bahwa pembangunan kapasitas merupakan proses pengembangan kemampuan yang diperlukan agar

Berdasarkan teori tersebut, penelitian difokuskan pada tiga dimensi utama capacity building, yaitu kapasitas individu (individual capacity), kapasitas organisasi (organizational capacity), dan kapasitas institusional (institutional capacity). Kapasitas individu berkaitan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kapasitas organisasi berhubungan dengan penguatan tata kelola dan kinerja lembaga pendidikan, sedangkan kapasitas institusional berkaitan dengan pengembangan kebijakan, regulasi, serta sistem yang mendukung penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan.

Melalui ketiga dimensi tersebut, penelitian bertujuan menganalisis bagaimana kerja sama Indonesia–Swiss berkontribusi terhadap penguatan pendidikan kepariwisataan di Indonesia. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menempatkan kerja sama bilateral sebagai konteks penelitian, pendidikan kepariwisataan sebagai fokus kajian, serta teori Capacity Building UNDP sebagai landasan analisis untuk mengkaji penguatan kapasitas pada tingkat individu, organisasi, dan institusi..